

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Yayuk Musrini

Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: yayukmusrini09@gmail.com

Muhammad Aufa

Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: aufa@umg.ac.id

Alamat : Jl. Sumatra No.101, Gunung Malang, Randuagung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121

Korespondensi penulis: yayukmusrini09@gmail.com

Abstract. *This research aims to examine the influence of Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Regional Government Financial Performance. Using 38 samples of Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports (APBD) for Regency/City Regional Governments in East Java Province for the 2020-2022 period which have been officially published and audited by the East Java Province Representative Financial Audit Agency (BPK Jatim). Testing was carried out using multiple regression. The test results prove that Regional Original Income has an influence on Regional Government Financial Performance. General Allocation Funds and Special Allocation Funds have no effect on Regional Government Financial Performance.*

Keywords: *Original Regional Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Government Financial Performance*

Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menggunakan 38 sampel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2022 yang telah resmi diterbitkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim). Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

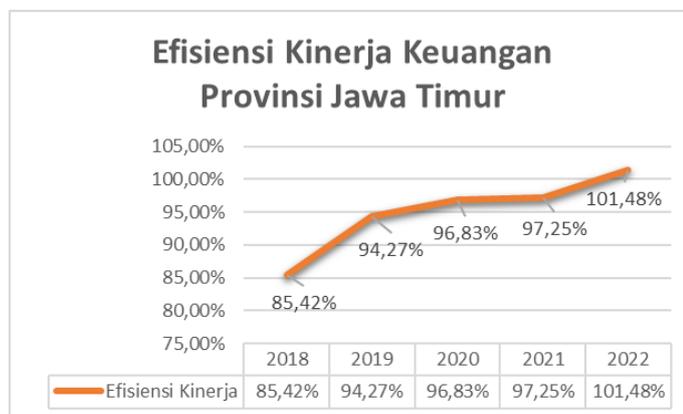
PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah mempunyai peranan sebagai instrumen representasi dari pemerintah pusat dalam kesejahteraan masyarakat melalui prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintahan daerah. Potensi keuangan daerah merupakan kunci bagi keberhasilan otonomi daerah, yang menunjukkan kemandirian ketika daerah mampu mengelola aset-aset ekonomi yang dimilikinya. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, penting dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan dan kemajuan daerah. Keberhasilan ekonomi daerah diukur melalui kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan dana

perimbangan. Namun tantangan seperti ketergantungan terhadap dana pusat dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah masih menjadi isu permasalahan yang harus diatasi dan dituntaskan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Era, 2023), (Febriyanti, 2022).

Pendapatan Transfer masih menjadi mayoritas pendapatan daerah di Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Selama kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak terbatas, kuantitas keuangan pemerintah daerah tidak akan banyak berubah yang menyebabkan menyebabkan komposisi pendapatan cenderung stabil. Proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah menjadi salah satu indikator ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya tersebut dapat mengakibatkan masalah keuangan bagi pemerintah daerah.

Gambar 1. Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur



Sumber: BPK Provinsi Jawa Timur (data diolah, 2023)

Hubungan antara efisiensi dan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan publik. Efisiensi dalam pengendalian pengeluaran dapat membantu menurunkan biaya operasional dan mencapai keseimbangan anggaran, sedangkan efisiensi dalam meningkatkan pendapatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan menggunakan rasio efisiensi, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat seperti pengelolaan keuangan yang efektif, peningkatan pelayanan publik, dan akuntabilitas kepada masyarakat (Nuwun, dkk, 2020). Hal ini juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti sebelumnya menggunakan rasio efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah juga sangat terbatas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi perbedaan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Machmud & Radjak, 2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian (Febriyanti, 2022) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian (Era, 2023) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dibahas, dikaji dan diteliti kembali untuk melakukan penelitian dan analisis yang mendalam untuk mengetahui dampak sebenarnya dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yaitu: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ? (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur? (3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur?

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan suatu hubungan kontra dimana pada satu atau lebih prinsipal dan agen (C.Jensen, 1976). Korelasi teori keagenan dengan penelitian ini dapat dijelaskan melalui investigasi hubungan antara masyarakat yang diwakili oleh DPRD (*prinsipal*) dan pemerintah daerah (*agent*). Pemerintahan pusat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintahan daerah untuk mengawasi dan mengurus daerahnya sendiri. Akibat pengalihan kewenangan tersebut, pemerintah pusat menyediakan dana perimbangan untuk mendukung pemerintah daerah dalam membantu pendanaan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Dalam teori keagenan dijelaskan terdapat perbedaan antara prinsipal dan agen dalam melaksanakan pemerintahan, sehingga permasalahan akan muncul karena pihak-pihak tersebut memaksimalkan fungsi kegunaannya masing-masing.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah pendapatan anggaran melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan pendapatan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai penambahan ekuitas daerah, hak milik daerah dalam 1 tahun anggaran termasuk pajak daerah , retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah (Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019). Pendapatan asli daerah dimaksud agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan sumber daya daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Undang-Undang No.33, 2004). Hal ini jelas bahwa pendapatan asli daerah sebagai pendanaan utama daerah untuk membantu melaksanakan prakarsa pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan semua golongan masyarakat. Pengukuran variabel pendapatan asli daerah ini diukur dengan menggunakan skala rasio, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mustikarini, dkk, 2012), (Reza, 2016) .

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021). Tingkat dana alokasi umum yang cukup dan stabil dapat memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan daerah yang sejalan dengan kinerja keuangan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pengukuran variabel dana alokasi umum diukur dengan menggunakan skala rasio, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Era, 2023), (Wiguna, 2015).

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum (DAU)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyediakan dana yang disebut Dana Alokasi Khusus, yang disalurkan ke daerah tertentu untuk mendukung inisiatif-inisiatif unik yang menjadi permasalahan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Untuk mendanai kegiatan khusus yang diprioritaskan secara nasional yang dimaksud adalah menyediakan pendanaan bagi tugas-tugas urusan pemerintahan tertentu yang menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan istilah yang digunakan untuk mencirikan pendapatan dana transfer khusus (Permendagri Nomor 27 Tahun 2021). Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya rasio tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2015), (Reza, 2016) , skala rasio digunakan untuk mengukur variabel dana alokasi khusus.

$$\text{Rasio DAK} = \frac{\text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100 \%$$

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah hasil atau ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program atau kegiatan yang direncanakan atau diselesaikan sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan memperhatikan seluruh masukan, keluaran dan hasil. Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021), tolak ukur kinerja adalah pengukuran prestasi kerja yang akan dicapai sejak awal dengan memperhatikan unsur kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Perhitungan berdasarkan penelitian untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah menurut (Halim, 2014:129) .

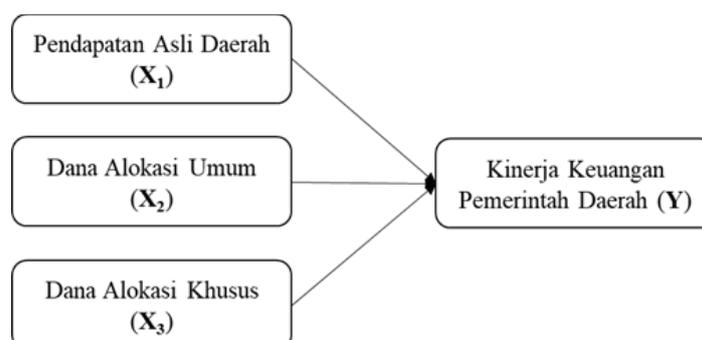
$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100 \%$$

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Sangat Efisien	< 60
Efisien	> 60 – 80
Cukup Efisien	> 80 – 90
Kurang Efisien	> 90 – 100
Tidak Efisien	> 100

Pengembangan Hipotesis

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Korelasi teori agency dengan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan melalui hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam konteks pengelolaan pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan pengawasan dan akuntabilitas, dimana prinsipal (masyarakat) mengawasi

tindakan agen (pemerintah daerah) untuk memastikan bahwa pendapatan asli daerah dikelola dengan baik. Dengan melibatkan transparansi, akuntabilitas dan pemberian laporan keuangan kepada Masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mustanda, 2019), (Joni Fernandes, 2022), (Febriyanti, 2022) menunjukkan bukti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar peningkatan pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja keuangannya. Mengingat landasan teoritis dan empiris yang disebutkan di atas, penelitian ini berupaya menguji hipotesis berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hubungan antara teori keagenan dan dana alokasi umum dapat dijelaskan melalui pengelolaan dana dalam konteks pemerintahan, dana alokasi umum sebagai (principal) mempercayakan pengelolaan dan pengalokasian dana kepada berbagai departemen dan pemerintah (agent) yang merespons memungkinkan untuk mengelola dana selaras dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan oleh principal. Penelitian terdahulu (Febriyanti, 2022), (Berti, 2021), (Nuwun, Ari, 2020) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai proyek dan kegiatan berkorelasi positif dengan besarnya dana alokasi umum yang dihasilkan pemerintah. Semakin besar nilai dana alokasi umum yang diperoleh pemerintah maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap nilai kinerja keuangan daerah. Hipotesis penelitian ini dikembangkan berdasarkan literatur teori yang ada:

H₂ : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hubungan antara teori keagenan dan dana alokasi khusus dapat dijelaskan melalui Asimetri Informasi dimana terdapat hubungan antara pemerintah pusat (agent) dan mungkin tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang bagaimana dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah (*principal*). Oleh karena itu, teori agensi membantu menganalisis pemerintah pusat mengontrol tindakan pemerintah daerah bahwa dana alokasi khusus digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Machmud & Radjak, 2018), (Febriyanti, 2022), (Nuwun, Ari, 2020) berpendapat bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh yang cukup besar dan signifikan secara statistik terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keberhasilan finansial berbanding terbalik dengan besarnya dana alokasi khusus yang diciptakan oleh pemerintah. Semakin besar dana alokasi khusus yang diperoleh Pemerintah maka kinerja keuangan daerah tersebut akan semakin rendah. Hipotesis penelitian ini dikembangkan berdasarkan literatur teori yang ada:

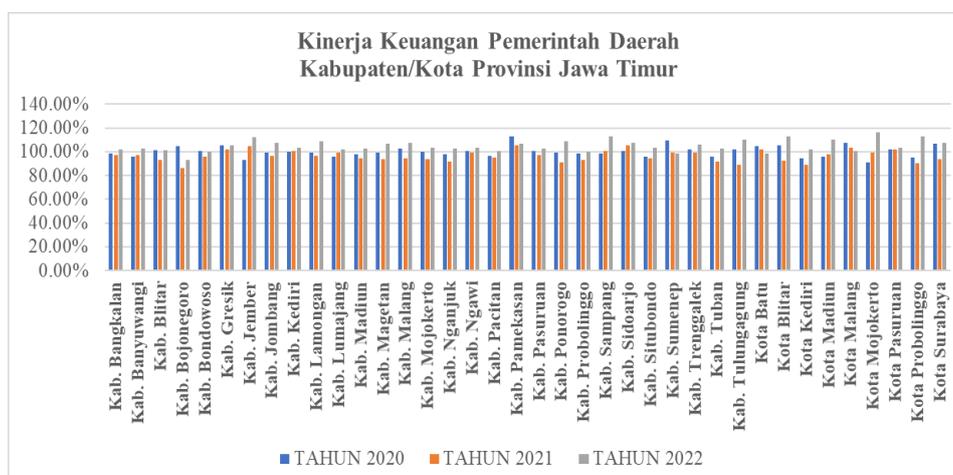
H₃ : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan pengumpulan data melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2020-2022. Populasi yang digunakan adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode total sampling. Sampel dipilih berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 kabupaten/kota, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, dengan data penelitian selama 3 periode tahun 2020-2022. Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu jenis data penelitian yang meliputi Laporan Realisasi APBD di Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dan pengambilan data yang tidak disampaikan secara langsung kepada subjek penelitian. Teknik analisis data: uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Dokumentasi Data



Grafik 1. Presentase Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: BPK Provinsi Jawa Timur (data diolah, 2023)

Pada Grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode tahun 2020 tidak efisien ($> 100\%$) yaitu sebesar 100,16%. Pada tahun 2021 kinerjanya kurang efisien ($> 90 - 100\%$) yaitu sebesar 96,49%. Pada tahun 2022 kinerjanya kembali tidak efisien ($> 100\%$) yaitu sebesar 104,94%. Secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami 3 kondisi yaitu, kinerja keuangan cukup efisien, kinerja keuangan kurang efisien dan kinerja keuangan tidak efisien.

Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	114	7.40	60.45	19.3539	9.26161
Dana Alokasi Umum	114	12.94	50.99	39.5269	7.63088
Dana Alokasi Khusus	114	1.36	20.82	12.1031	4.10039
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	114	86.16	116.13	100.5311	5.85431
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 114 (N) sampel penelitian. Temuan penelitian yang dilakukan antara tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mempunyai nilai rata-rata sebesar 19,35 dan standar deviasi sebesar 9,26. Berdasarkan temuan uji statistik deskriptif 60,45 adalah nilai terbesar (maksimum) dan 7,40 adalah nilai terendah (minimum).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Variabel DAU Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mempunyai nilai rata-rata sebesar 39,52 dan standar deviasi sebesar 7,63. Berdasarkan temuan uji statistik deskriptif 12,94 merupakan nilai terendah (minimum) dan 50,99 merupakan nilai tertinggi (maksimum).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Variabel DAK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mempunyai nilai rata-rata sebesar 12,10 dan standar deviasi sebesar 4,10. Berdasarkan temuan uji statistik deskriptif diperoleh nilai tertinggi (maksimum) sebesar 20,82 dan nilai terendah (minimum) sebesar 1,36.

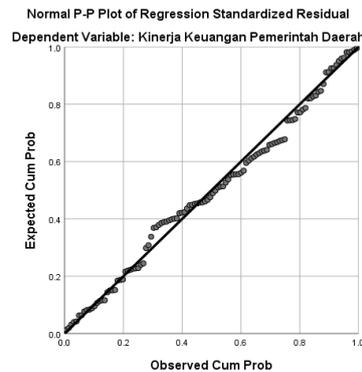
d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai nilai rata-rata sebesar 100,53 dan standar deviasi sebesar 5,85. Berdasarkan temuan uji statistik deskriptif diperoleh nilai tertinggi (maksimum) sebesar 116,13 dan nilai terendah (minimum) sebesar 86,16.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Uji normalitas



Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Data yang diplot (diwakili oleh titik-titik) pada Tabel diatas tersebar secara merata disepanjang garis diagonal. Hasilnya, sebaran regresi model dinyatakan normal. Untuk verifikasi kembali data diuji kembali menggunakan On-Sample Kolmogorov-Smirnov.

b. Hasil Uji Normalitas On-Sample Kolmogorov-Smirnov

Tabel 4. Pada Uji Normalitas Sampel Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.69906642
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.069
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.165 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Pada Tabel diatas, uji normalitas menggunakan On-Sample Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,165. Dengan hasil $> 0,05$ ($0,165 > 0,05$) dapat disimpulkan bahwa nilai residu berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi artinya data tidak mengalami masalah normalitas.

c. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	87.432	5.718		15.292	.000		
Pendapatan Asli Daerah	.200	.089	.316	2.258	.026	.439	2.277
Dana Alokasi Umum	.159	.101	.208	1.585	.116	.501	1.995
Dana Alokasi Khusus	.242	.154	.170	1.571	.119	.740	1.352

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Pada Tabel diatas, variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai toleransi sebesar $0,439 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $2,277 < 10$. Variabel dana alokasi umum mempunyai nilai toleransi sebesar $0,501 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,995 < 10$. variabel dana alokasi khusus mempunyai nilai toleransi sebesar $0,740 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,352 < 10$. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada ketiga variabel independen.

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas Gletser

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Gletser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.183	2.284		.518	.606
Pendapatan Asli Daerah	.052	.035	.206	1.484	.141
Dana Alokasi Umum	.018	.040	.059	.456	.649
Dana Alokasi Khusus	-.077	.062	-.134	-1.253	.213

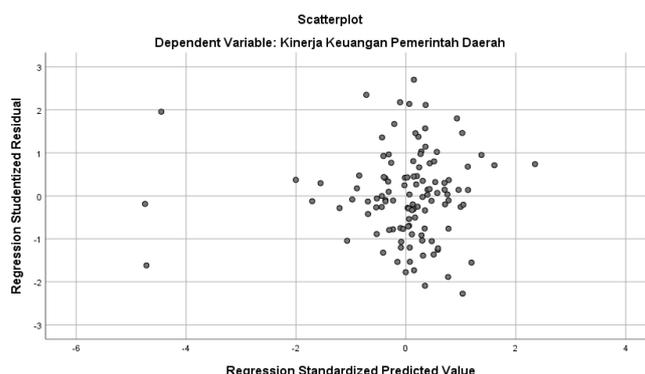
a. Dependent Variable: LN_RES

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Pada Tabel diatas, variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai signifikan sebesar $0,141 > 0,05$. Variabel dana alokasi umum mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,649 > 0,05$. Variabel dana alokasi khusus mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,213 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas. Untuk memastikan data kembali, dilakukan pengujian kembali menggunakan *Scatterplots*.

e. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplots

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas Scatterplots



Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Pada Tabel diatas, titik data tersebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Titik data tidak berkumpul pada satu titik. Kemudian titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang jelas. Jadi dapat disimpulkan tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas sehingga penulis dapat melanjutkan ke pengujian selanjutnya.

f. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.229 ^a	.052	.026	5.77626	1.553

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Pada Tabel diatas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Waston* sebesar 1,553. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan signifikansi 5%, jumlah data (n) sebanyak 114 dan jumlah variabel independen sebanyak 3 (k=3), maka diperoleh nilai $dU = 1,7488$. Jadi nilai $4-dU = 2,2512$. Jadi hasilnya $dU (1,74886) < dW (1,553) < 4-dU (2,2512)$. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian data tidak terjadi autokorelasi.

3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	87.432	5.718		15.292	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.200	.089	.316	2.258	.026
	Dana Alokasi Umum	.159	.101	.208	1.585	.116
	Dana Alokasi Khusus	.242	.154	.170	1.571	.119

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 87,432 + 0,200 X_1 + 0,159 X_2 + 0,242 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
$\beta_1-1, \beta_2-2, \beta_3-3$	= Koefisien Regresi Variabel Independen
X ₁	= Pendapatan Asli Daerah
X ₂	= Dana Alokasi Umum
X ₃	= Dana Alokasi Khusus
α	= Konstanta
e	= Standar Error

Berdasarkan pada Tabel diatas, hasil uji dari persamaan model regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 87,432 artinya jika semua variabel independen , yaitu Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Alokasi Khusus (X₃), nilainya tetap, maka pada pengungkapan kinerja keuangan pemerintah daerah nilainya adalah 87,432.
2. Koefisien regresi variabel pendapatan daerah sebesar 0,316 dengan arah hubungan antara pendapatan asli daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1% (pertambahan satuan) maka akan diikuti dengan peningkatan nilai kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,316 dengan asumsi koefisien regresi variabel pendapatan daerah *adalah constant*.
3. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,208 dengan arah hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana alokasi umum sebesar 1% (pertambahan satuan) maka akan diikuti dengan peningkatan nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,208 dengan asumsi koefisien regresi dana alokasi umum variabel dana *adalah constant*.
4. Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus sebesar 0,170 dengan arah hubungan dana alokasi khusus dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana alokasi khusus sebesar 1% (pertambahan satuan) maka akan diikuti kenaikan nilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,170 dengan asumsi regresi koefisien variabel dana alokasi khusus *adalah constant*.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Parsial (T)

Tabel 10. Uji Parsial (T)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	87.432	5.718		15.292	.000
Pendapatan Asli Daerah	.200	.089	.316	2.258	.026
Dana Alokasi Umum	.159	.101	.208	1.585	.116
Dana Alokasi Khusus	.242	.154	.170	1.571	.119

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Pada Tabel diatas, hasil uji parsial (uji t) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan jika signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai Sig. 0,026 dan t-hitung sebesar 2,258. Karena signifikansi pada uji t lebih kecil dari 0,05 ($0,026 < 0,05$) dan nilai thitung $> t_{tabel}$ ($2,258 > 1,981$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan signifikansinya, jika signifikansinya $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan jika signifikansinya $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Alokasi umum dana tersebut mempunyai nilai sig. 0,116 dan t-hitung sebesar 1,585. Karena signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 ($0,116 > 0,05$) dan nilai thitung $< t_{tabel}$ ($1,585 < 1,981$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan jika signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Dana alokasi khusus mempunyai nilai Sig. 0,119 dan t-hitung sebesar 1,571. Karena signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05 ($0,119 > 0,05$) dan nilai thitung $< t_{tabel}$ ($1,571 < 1,981$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Hasil Uji Simultan (F)

Tabel 11. Uji Simultan (F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.119	3	14.373	2.700	.049 ^b
	Residual	585.578	110	5.323		
	Total	628.697	113			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Pada Tabel diatas, diperoleh hasil perhitungan regresi dengan nilai Fhitung sebesar 2,700 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 (signifikansi $0,049 < 0,05$), sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,69, nilai fhitung $>$ ftabel ($2,700 > 2,69$) . Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara keseluruhan yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Tabel 12. Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.229 ^a	.052	.026	5.77626

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS (data diolah, 2023)

Pada Tabel diatas, terlihat ringkasan model yang terdiri dari hasil korelasi berganda nilai (R), koefisien determinasi yang disesuaikan (R Square) dan besar kecilnya kesalahan prediksi (Std. Error of Perkiraan). Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,052 atau 0,5%. Nilai tersebut merupakan persentase Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 0,95% (100% - 0,5%) dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Interpretasi Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur terlaksana dengan baik, meningkatkan kinerja keuangan daerah dan mendorong proses desentralisasi. Peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya (Berti, 2021). Peningkatan pendapatan daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pendapatan Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangannya (Era, 2023). Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mustanda, 2019) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah yang dihasilkan pemerintah daerah mempunyai kontribusi penting dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Fernandes, 2022) juga menyatakan bahwa tingginya pendapatan daerah yang mampu dihasilkan pemerintah daerah akan mampu meminimalisir ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Febriyanti, 2022) menyatakan bahwa daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang besar akan cenderung memiliki kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih besar.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang lebih tinggi. Jika realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah maka terjadi defisit (UU Nomor 1 Tahun 2022). Penggunaan dana alokasi umum digunakan untuk mendukung sektor-sektor produktif pemerintahan daerah. Jika belanja yang dibutuhkan daerah semakin tinggi maka akan mengakibatkan pemerintah tidak mampu membiayai daerahnya sendiri dengan Pendapatan Asli Daerah (Mulia, 2016). Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan belanja daerah, pemerintah daerah mengambil bentuk bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer pendapatan, yaitu dana alokasi umum. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Verawaty, dkk, 2020) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tersebut tidak berasal dari kreativitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan (Era, 2023) juga menyatakan bahwa semakin tinggi alokasi umum dana yang diterima, hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan prinsip teoritis, dimana teori keagenan menyatakan bahwa transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dapat memberikan stabilitas pendapatan bagi pemerintah daerah, sehingga memungkinkan daerah merencanakan anggarannya dengan lebih baik (C .Jensen, 1976). Namun kondisi Pemerintahan

Daerah Provinsi Jawa Timur bertolak belakang dengan landasan teori yaitu adanya ketergantungan pada dana alokasi khusus sehingga mengurangi insentif pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya dengan baik, karena pemerintah daerah bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari sumber lain. Semakin besar alokasi khusus dana Pendapatan Transfer yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin besar pula alokasi khusus tersebut semakin besar pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer pemerintah pusat juga akan semakin besar, namun hal ini tidak mengubah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto, 2020) yang menyatakan bahwa setiap kenaikan dan penurunan dana alokasi khusus tidak diikuti dengan peningkatan atau penurunan kinerja keuangan daerah. Menurut (Jauhar, 2016) menyatakan bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh tetap sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena berasal dari pemerintah pusat, sedangkan Dana Alokasi Khusus juga tidak berpengaruh karena harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Meskipun dana alokasi khusus tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun tidak mengubah ketergantungan terhadap dana bantuan tersebut.

Saran

1. Saran Praktis : Pemerintah daerah Jawa Timur perlu meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola keuangan dengan lebih mandiri.
2. Saran Teoritis : Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dan menambah variabel untuk memahami pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Berti, HW (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Era, H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Mirai*, Volume 7 (Edisi 3 (2022)), 629–637. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Febriyanti, EM (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Mirai*, Volume 7 (Edisi 3 (2022)), 629–637. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.3591>
- Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah . Edisi ke 2. Jakarta : Salemba Empat. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Harjito, Y., Nugraha, G., & Yulianto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indo theesia . *Jurnal Teomik Akuntansi dan Ekonomi* . [Di telepon] Vol. 5 No.1. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Jauhar, F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 61–70. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2355>
- Jenson, MC, & Meckling, WH (1976). Teori perusahaan: Perilaku manajerial, biaya keagenan dan struktur kepemilikan. *Jurnal teomik Ekonomi Keuangan*, 3(4), <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Joni Fernandes, SP (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Pengendalian Akuntansi*, 1(2), 30–46. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.154>
- Machmud, J., & Radjak, LI (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Marizka, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, *Jurnal Skripsi, Universitas Negeri Padang*. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/796>
- Mustikarini, Widya Astuti., Fitriasari, Debby. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia theesia Tahun Anggaran 2007.” Simposium Akuntansi Nasional XV . Banjarmasin, 20-23 September 2012
- Mulia, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Volume 5, No. 3 hal 30–38*. <https://jurnal.usk.ac.id/JAA/article/view/4523/3898>

- Nurbaeti. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. *Skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. (Vol.21, Edisi 1)*. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/6264>
- Nuwun, Ari, Y. (2020). Pengaruh Dana Pad dan Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Penelitian Teomik Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161858/pp-no-27-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2/2019. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Putri, ED (2015). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Evrintia Dini Putri*, 16.1.2015 <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3266>
- Sari, NMDP, & Mustanda, IK (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Theesia Nomor 6757, 104172*, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemrintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Wiguna, KY (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Fordema*, 12(1), 1–50. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/fordema/article/view/291>